



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

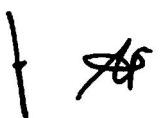
**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

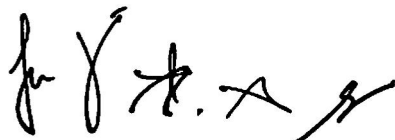
BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

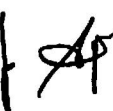
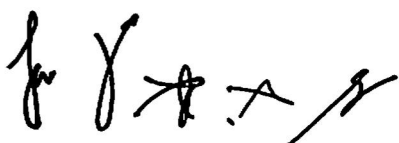
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

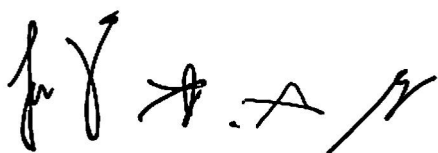
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

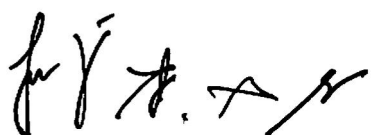
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.



7. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



16. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kejelasan tentang Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Penyaluran;
 - c. Penggunaan; dan
 - d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ju Y. A. ...

1/8

- (2) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.239.298.698,00 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp6.792.905.892,00 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu*); dan
 - Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp446.392.806,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*).

Pasal 4

- (1) Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penetapan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 60% (*Enam Puluh Persen*) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - 40% (*Empat Puluh Persen*) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa.
- (3) Penetapan 60% (*Enam Puluh Persen*) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumusan:

$$\text{BHM} = \frac{60\% \times \text{Total Bagi Hasil Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Desa}}$$

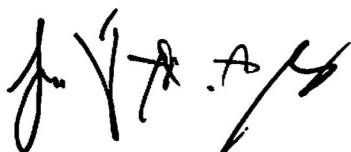
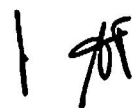
BHM = Bagian Hasil Merata

- (4) Penetapan 40% (*Empat Puluh Persen*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumusan:

$$\text{BHP} = 40\% \times \text{Total Bagi Hasil Tahun Berjalan}$$

BHP Bagian Hasil Proporsional

- (5) Rincian penetapan proporsional sebesar 40% (*Empat Puluh Persen*) berasal dari:
- 75% (*Tujuh Puluh Lima Persen*) berasal dari penetapan PBB-P2 tahun sebelumnya pada masing-masing desa; dan
 - 25% (*Dua Puluh Lima Persen*) berasal dari penetapan pajak sarang burung walet tahun berjalan pada masing-masing desa.

(6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a dan huruf b dihitung dengan rumus:

a. Rumus perhitungan proporsional dari PBB-P2:

$$\text{BHP}_x = \frac{\text{Penetapan PBB-P2 dari Desa}}{\text{Total Penetapan PBB-P2 Desa di Daerah}} \times \text{BHP}$$

BHP_x = Bagi Hasil yang diterima oleh masing-masing Desa

b. Rumus perhitungan proporsional dari Pajak Sarang Burung Walet:

$$\text{BHP}_x = \frac{\text{Penetapan Pajak Sarang Burung Walet dari Desa}}{\text{Total Penetapan Pajak Sarang Burung Walet di Daerah}} \times \text{BHP}$$

(7) Rincian Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan pada Triwulan IV setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahunnya dianggarkan dalam APBDesa.

fu y tk. A/S

1 AF

- (5) Kekurangan atas penyaluran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa tahun anggaran 2022 diakui sebagaimana utang bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dibayarkan pada tahun berikutnya setelah audit / revidu Inspektorat Daerah.
- (6) Besaran penyaluran bagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang didanai oleh bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk kegiatan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan penyediaan sarana/ prasarana desa yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Penundaan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa dilakukan apabila Kepala Desa tidak Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sampai dengan batas waktu penyampaian akhir Triwulan III tahun bersangkutan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Bagian Hasil Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Inspektur Daerah;
 - c. Camat.

fu V A A

1 15

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pelatihan, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/ANALISIS	
KONSEPTOR	

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 27 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

DJAINUDDIN NOOR

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

WABUP		
SEKDA		
ASISTEN		
KABAG	HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 15.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERUYAN
 NOMOR **13** TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN
 PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	* DATA PBB P2 TAHUN 2021 (Rp)	DATA TARGET PAJAK SARANG BURUNG WALET TA. 2022 (Rp)	PENETAPAN DBH 2022							
					PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			TOTAL	
					60%	40%	JUMLAH	60%	40%	JUMLAH		
1	SERUYAN HILIR	SUNGAI PERLU	6,735,564.00	13,047,500.00	42,017,974.00	3,520,074.00	13,344,742.00	58,882,790.00	2,761,192.00	308,426.00	3,069,618.00	61,952,408.00
		PEMATANG LIMAU	106,012,159.00	13,047,500.00	42,017,974.00	55,403,041.00	13,344,742.00	110,765,757.00	2,761,192.00	4,854,381.00	7,615,573.00	118,381,330.00
		TAKJUNG RANGAS	188,401,854.00	13,047,500.00	42,017,974.00	98,460,741.00	13,344,742.00	153,823,457.00	2,761,192.00	8,627,072.00	11,388,264.00	165,211,721.00
		MUARA DUA	4,763,470.00	13,047,500.00	42,017,974.00	2,489,438.00	13,344,742.00	57,852,154.00	2,761,192.00	218,123.00	2,979,315.00	60,831,469.00
		JAHTAN	7,912,169.00	13,047,500.00	42,017,974.00	4,134,980.00	13,344,742.00	59,497,696.00	2,761,192.00	362,304.00	3,123,496.00	62,621,192.00
		BAUNG	67,291,418.00	13,047,500.00	42,017,974.00	35,167,185.00	13,344,742.00	90,529,901.00	2,761,192.00	3,081,328.00	5,842,520.00	96,372,421.00
		PERSIL RAYA	46,356,120.00	13,047,500.00	42,017,974.00	24,226,183.00	13,344,742.00	79,588,899.00	2,761,192.00	2,122,683.00	4,883,875.00	84,472,774.00
		SUNGAI URDANG	51,201,209.00	13,047,500.00	42,017,974.00	26,758,277.00	13,344,742.00	82,120,993.00	2,761,192.00	2,344,544.00	5,105,736.00	87,226,729.00
		SUBTOTAL	478,673,963.00	104,380,000.00	336,143,792.00	250,159,919.00	106,757,936.00	693,061,647.00	22,089,536.00	21,918,861.00	44,008,397.00	737,070,044.00
2	SERUYAN HILIR TIMUR	MEKAR INDAH	10,820,327.00	7,132,000.00	42,017,974.00	5,654,813.00	7,294,477.00	54,967,264.00	2,761,192.00	495,471.00	3,256,663.00	58,223,927.00
		HALIMAUNG JAYA	64,310,767.00	7,132,000.00	42,017,974.00	33,609,466.00	7,294,477.00	82,921,917.00	2,761,192.00	2,944,841.00	5,706,033.00	88,627,950.00
		BANGUN HARJA	22,535,869.00	7,132,000.00	42,017,974.00	11,777,476.00	7,294,477.00	61,089,927.00	2,761,192.00	1,031,935.00	3,793,127.00	64,883,054.00
		KARTIKA BHAKTI	49,626,411.00	7,132,000.00	42,017,974.00	25,935,271.00	7,294,477.00	75,247,722.00	2,761,192.00	2,272,433.00	5,033,525.00	80,281,347.00
		SUNGAI BAKAU	97,344,648.00	7,132,000.00	42,017,974.00	50,873,311.00	7,294,477.00	100,185,762.00	2,761,192.00	4,457,489.00	7,218,581.00	107,404,443.00
		PEMATANG PANJANG	61,524,309.00	7,132,000.00	42,017,974.00	32,153,235.00	7,294,477.00	81,465,686.00	2,761,192.00	2,817,247.00	5,578,439.00	87,044,125.00
		SUBTOTAL	306,162,331.00	42,792,000.00	252,107,344.00	160,003,572.00	43,766,862.00	455,578,278.00	16,567,152.00	14,019,416.00	30,586,568.00	486,464,846.00
3	SERUYAN RAYA	TERAWAN	97,666,217.00	9,824,000.00	42,017,974.00	51,041,266.00	10,047,805.00	103,107,145.00	2,761,192.00	4,472,214.00	7,233,406.00	110,340,551.00
		SELUNUK	42,499,909.00	9,824,000.00	42,017,974.00	22,210,888.00	10,047,805.00	74,276,567.00	2,761,192.00	1,946,104.00	4,707,296.00	78,983,963.00
		LAMPASA	50,640,287.00	9,824,000.00	42,017,974.00	26,465,133.00	10,047,805.00	78,530,912.00	2,761,192.00	2,318,859.00	5,080,051.00	83,510,963.00
		BANGKAL	114,712,778.00	9,824,000.00	42,017,974.00	59,950,074.00	10,047,805.00	112,015,853.00	2,761,192.00	5,252,790.00	8,013,982.00	120,029,835.00
		TABIKU	106,955,020.00	9,824,000.00	42,017,974.00	55,895,790.00	10,047,805.00	107,961,599.00	2,761,192.00	4,897,556.00	7,658,748.00	115,620,317.00
		SUBTOTAL	412,474,211.00	49,120,000.00	210,089,870.00	215,963,251.00	50,289,025.00	475,892,146.00	13,805,960.00	18,887,523.00	32,692,483.00	508,585,629.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4	DANAU SEMBULUH	TELAGA PULANG	41,629,596.00	11,512,500.00	42,017,974.00	21,756,053.00	11,774,772.00	75,548,799.00	2,761,192.00	1,906,252.00	4,667,444.00	80,216,243.00
		CEMPAKA BARU	533,299.00	11,512,500.00	42,017,974.00	278,707.00	11,774,772.00	54,071,453.00	2,761,192.00	24,420.00	2,785,612.00	56,857,065.00
		PALINGKAU	1,075,569.00	11,512,500.00	42,017,974.00	562,103.00	11,774,772.00	54,354,849.00	2,761,192.00	49,251.00	2,810,443.00	57,165,292.00
		ULAK BATU	4,026,346.00	11,512,500.00	42,017,974.00	2,104,209.00	11,774,772.00	55,896,955.00	2,761,192.00	184,369.00	2,945,561.00	58,842,516.00
		PAREN	1,175,988.00	11,512,500.00	42,017,974.00	614,583.00	11,774,772.00	54,407,329.00	2,761,192.00	53,849.00	2,815,041.00	57,222,370.00
		BARUA USANG	3,265,976.00	11,512,500.00	42,017,974.00	1,706,832.00	11,774,772.00	55,499,578.00	2,761,192.00	149,551.00	2,910,743.00	58,410,321.00
		SEMBULUH I	187,740,171.00	11,512,500.00	42,017,974.00	98,114,939.00	11,774,772.00	151,907,685.00	2,761,192.00	8,596,773.00	11,357,965.00	163,265,650.00
		SEMBULUH II	414,117,780.00	11,512,500.00	42,017,974.00	216,422,200.00	11,774,772.00	270,214,946.00	2,761,192.00	18,962,785.00	21,723,977.00	291,938,923.00
		SUBTOTAL	653,564,725.00	92,100,000	336,143,792.00	341,559,626.00	94,198,176.00	771,901,594.00	22,089,536.00	29,927,250.00	52,016,786.00	823,918,380.00
		5	HANAU	TARJUNG HANAU	1,640,052.00	14,034,286.00	42,017,974.00	657,108.00	14,354,008.00	57,229,090.00	2,761,192.00	75,099.00
PASAR BATANG	1,524,341.00			14,034,286.00	42,017,974.00	796,636.00	14,354,008.00	57,168,618.00	2,761,192.00	69,800.00	2,830,992.00	59,999,610.00
BAHAUR	6,505,700.00			14,034,286.00	42,017,974.00	3,399,945.00	14,354,008.00	59,771,927.00	2,761,192.00	297,901.00	3,059,093.00	62,831,020.00
PEMBUANG HULU I	264,737,489.00			14,034,286.00	42,017,974.00	138,354,527.00	14,354,008.00	194,726,509.00	2,761,192.00	12,122,542.00	14,883,734.00	209,610,243.00
PEMBUANG HULU II	75,625,520.00			14,034,286.00	42,017,974.00	39,522,672.00	14,354,008.00	95,894,654.00	2,761,192.00	3,462,953.00	6,224,145.00	102,118,799.00
DERANGGA	23,100,881.00			14,034,286.00	42,017,974.00	12,072,757.00	14,354,008.00	68,444,739.00	2,761,192.00	1,057,807.00	3,818,999.00	72,263,738.00
PARING RAYA	1,350,000.00			14,034,284.00	42,017,974.00	705,523.00	14,354,006.00	57,077,503.00	2,761,192.00	61,817.00	2,823,009.00	59,900,512.00
SUBTOTAL	374,483,983.00			98,240,000	294,123,818.00	195,709,168.00	100,478,054.00	590,213,040.00	19,328,344.00	17,147,919.00	36,476,263.00	626,789,303.00
6	DANAU SELULUK			ASAM BARU	64,425,867.00	8,186,667.00	42,017,974.00	33,669,619.00	8,373,171.00	84,060,764.00	2,761,192.00	2,950,112.00
		TANJUNG HARA	5,988,893.00	8,186,667.00	42,017,974.00	3,129,856.00	8,373,171.00	53,521,001.00	2,761,192.00	274,236.00	3,035,428.00	56,556,429.00
		TANJUNG PARING	4,806,045.00	8,186,667.00	42,017,974.00	2,511,688.00	8,373,171.00	52,902,833.00	2,761,192.00	220,072.00	2,981,264.00	55,884,097.00
		TANJUNG RANGAS II	1,509,150.00	8,186,667.00	42,017,974.00	788,697.00	8,373,171.00	51,179,842.00	2,761,192.00	69,105.00	2,830,297.00	54,010,139.00
		RUNGAU RAYA	120,494,300.00	8,186,667.00	42,017,974.00	62,971,557.00	8,373,171.00	113,362,702.00	2,761,192.00	5,517,530.00	8,278,722.00	121,641,424.00
		PANIMBA RAYA	583,107.00	8,186,665.00	42,017,974.00	304,737.00	8,373,169.00	50,695,880.00	2,761,192.00	26,700.00	2,787,892.00	53,483,772.00
		SUBTOTAL	197,807,362.00	49,120,000	252,107,844.00	103,376,154.00	50,239,034.00	405,723,022.00	16,567,152.00	9,067,755.00	25,624,907.00	431,347,929.00
7	BATU AMPAR	SEBADI	12,617,083.00	7,231,556.00	42,017,974.00	6,593,817.00	7,396,301.00	56,008,092.00	2,761,192.00	577,746.00	3,338,938.00	59,247,030.00
		SANDUL	35,501,742.00	7,231,556.00	42,017,974.00	18,553,574.00	7,396,301.00	67,967,849.00	2,761,192.00	1,625,653.00	4,386,845.00	72,354,694.00
		KALANG	8,774,381.00	7,231,556.00	42,017,974.00	4,585,581.00	7,396,301.00	53,999,856.00	2,761,192.00	401,785.00	3,162,977.00	57,162,833.00
		DERAWA	3,861,000.00	7,231,556.00	42,017,974.00	2,017,798.00	7,396,301.00	51,432,073.00	2,761,192.00	176,798.00	2,937,990.00	54,370,063.00
		WANA TIRTA	26,838,454.00	7,231,556.00	42,017,974.00	14,026,051.00	7,396,301.00	63,440,326.00	2,761,192.00	1,228,954.00	3,990,146.00	67,430,472.00
		SUKA MULYA	20,236,285.00	7,231,556.00	42,017,974.00	10,575,690.00	7,396,301.00	59,989,965.00	2,761,192.00	926,635.00	3,687,827.00	63,677,792.00
		DURIAN KAIT	16,249,769.00	7,231,556.00	42,017,974.00	8,492,295.00	7,396,301.00	57,906,570.00	2,761,192.00	744,089.00	3,505,281.00	61,411,851.00
		SAHARU	1,695,273.00	7,231,556.00	42,017,974.00	885,567.00	7,396,301.00	50,300,242.00	2,761,192.00	77,627.00	2,838,819.00	53,139,061.00
		BATU MENANGIS	5,042,550.00	7,231,552.00	42,017,974.00	2,635,288.00	7,396,297.00	52,049,559.00	2,761,192.00	230,902.00	2,992,094.00	55,041,653.00
		SUBTOTAL	130,816,537.00	65,084,000	378,161,766.00	68,366,061.00	66,566,705.00	513,094,522.00	24,850,728.00	5,990,189.00	30,840,917.00	543,935,449.00

J. Y. A. B. / S

1 / S

8	SULING TAMBUN	TUMBANG MAGIN	1,200,000.00	5,457,778.00	42,017,974.00	627,132.00	5,582,114.00	48,227,220.00	2,761,192.00	54,948.00	2,816,140.00	51,043,260.00
		TUMBANG SBTOLI	7,667,188.00	5,457,778.00	42,017,974.00	4,006,951.00	5,582,114.00	51,607,039.00	2,761,192.00	351,086.00	3,112,278.00	54,719,317.00
		TUMBANG HENTAS	1,302,000.00	5,457,778.00	42,017,974.00	680,438.00	5,582,114.00	48,280,526.00	2,761,192.00	59,619.00	2,820,811.00	51,101,337.00
		TUMBANG LANGKAI	8,383,141.00	5,457,778.00	42,017,974.00	4,381,115.00	5,582,114.00	51,981,203.00	2,761,192.00	383,870.00	3,145,062.00	55,126,265.00
		TUMBANG SALAU	3,158,786.00	5,457,778.00	42,017,974.00	1,650,813.00	5,582,114.00	49,250,901.00	2,761,192.00	144,643.00	2,905,835.00	52,156,736.00
		TUMBANG GUGUP	7,491,637.00	5,457,778.00	42,017,974.00	3,915,206.00	5,582,114.00	51,515,294.00	2,761,192.00	343,048.00	3,104,240.00	54,619,534.00
		RANGKANG MUNDUK	2,276,228.00	5,457,778.00	42,017,974.00	1,189,580.00	5,582,114.00	48,789,668.00	2,761,192.00	104,230.00	2,865,422.00	51,655,090.00
		TANJUNG TUKAL	1,399,504.00	5,457,778.00	42,017,974.00	731,395.00	5,582,114.00	48,331,483.00	2,761,192.00	64,084.00	2,825,276.00	51,156,759.00
		RANTAU BETUNG	3,854,210.00	5,457,778.00	42,017,974.00	2,014,249.00	5,582,112.00	49,614,335.00	2,761,192.00	176,487.00	2,937,679.00	52,552,014.00
			SUBTOTAL	36,732,694.00	49,120,000.00	378,161,766.00	19,196,879.00	50,239,024.00	447,597,669.00	24,850,728.00	1,682,015.00	26,532,743.00
9	SERUYAN TENGAH	GANTUNG PENGAYUH	4,396,830.00	2,779,158.00	42,017,974.00	2,297,828.00	2,842,471.00	47,158,273.00	2,761,192.00	201,334.00	2,962,526.00	50,120,799.00
		TELUK BAYUR	23,789,130.00	2,779,158.00	42,017,974.00	12,432,443.00	2,842,471.00	57,292,888.00	2,761,192.00	1,089,323.00	3,850,515.00	61,143,403.00
		SUKA MANDANG	48,085,151.00	2,779,158.00	42,017,974.00	25,129,793.00	2,842,471.00	69,990,238.00	2,761,192.00	2,201,857.00	4,963,049.00	74,953,287.00
		AYAWAN	59,954,386.00	2,779,158.00	42,017,974.00	31,332,777.00	2,842,471.00	76,193,222.00	2,761,192.00	2,745,359.00	5,506,551.00	81,699,773.00
		MUGI PANYUHU	1,545,000.00	2,779,158.00	42,017,974.00	807,432.00	2,842,471.00	45,567,877.00	2,761,192.00	70,746.00	2,831,938.00	48,499,815.00
		BUKIT BULUH	2,943,662.00	2,779,158.00	42,017,974.00	1,538,387.00	2,842,471.00	46,398,832.00	2,761,192.00	134,792.00	2,895,584.00	49,294,816.00
		TUMBIANG BAI	14,942,295.00	2,779,158.00	42,017,974.00	7,808,996.00	2,842,471.00	52,669,441.00	2,761,192.00	684,219.00	3,445,411.00	56,114,832.00
		DURIAN TUNGGAL	6,353,366.00	2,779,158.00	42,017,974.00	3,320,334.00	2,842,471.00	48,180,779.00	2,761,192.00	290,925.00	3,052,117.00	51,232,896.00
		PANYUMPA	4,020,134.00	2,779,158.00	42,017,974.00	2,100,963.00	2,842,471.00	46,961,408.00	2,761,192.00	184,085.00	2,945,277.00	49,906,685.00
		PANGKE	1,560,000.00	2,779,158.00	42,017,974.00	815,272.00	2,842,471.00	45,675,717.00	2,761,192.00	71,433.00	2,832,625.00	48,508,342.00
		SUKOREJO	294,758,383.00	2,779,158.00	42,017,974.00	154,043,754.00	2,842,471.00	198,904,199.00	2,761,192.00	13,497,222.00	16,258,414.00	215,162,613.00
		BATU AGUNG	57,331,048.00	2,779,158.00	42,017,974.00	29,961,793.00	2,842,471.00	74,822,238.00	2,761,192.00	2,625,234.00	5,286,426.00	80,208,664.00
		PANCA JAYA	8,910,000.00	2,779,158.00	42,017,974.00	4,656,457.00	2,842,471.00	49,516,902.00	2,761,192.00	407,996.00	3,169,188.00	52,686,090.00
		SUKAJAYA	31,022,878.00	2,779,158.00	42,017,974.00	16,212,874.00	2,842,471.00	61,073,319.00	2,761,192.00	1,420,562.00	4,181,754.00	65,255,073.00
		BUMI JAYA	190,529,520.00	2,779,158.00	42,017,974.00	99,572,681.00	2,842,471.00	144,433,126.00	2,761,192.00	8,724,499.00	11,485,691.00	155,918,817.00
		TANGGA BATU	42,957,390.00	2,779,158.00	42,017,974.00	22,449,972.00	2,842,471.00	67,310,417.00	2,761,192.00	1,967,053.00	4,728,245.00	72,038,662.00
		RINGIN AGUNG	22,030,948.00	2,779,158.00	42,017,974.00	11,513,599.00	2,842,471.00	56,374,044.00	2,761,192.00	1,008,814.00	3,770,006.00	60,144,050.00
		SUKA MAJU	188,767,363.00	2,779,158.00	42,017,974.00	98,651,760.00	2,842,471.00	143,512,205.00	2,761,192.00	8,643,809.00	11,405,001.00	154,917,206.00
		SUKA MAKMUR	210,612,188.00	2,779,156.00	42,017,974.00	110,068,090.00	2,842,469.00	154,928,533.00	2,761,192.00	9,644,101.00	12,405,293.00	167,333,826.00
			SUBTOTAL	1,214,509,673.00	52,804,000.00	798,341,506.00	634,715,205.00	54,006,947.00	1,487,063,658.00	52,462,648.00	55,613,363.00	108,076,011.00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

10	SERUYAN HULU	MARAKDANG	2,711,934.00	3,070,000.00	42,017,974.00	1,417,284.00	3,139,939.00	46,575,197.00	2,761,192.00	124,181.00	2,885,373.00	49,460,570.00
		TUMBANG SURI	1,750,717.00	3,070,000.00	42,017,974.00	914,942.00	3,139,939.00	46,072,855.00	2,761,192.00	80,166.00	2,841,358.00	48,914,213.00
		TUMBANG MARJUL	39,903,386.00	3,070,000.00	42,017,974.00	20,853,918.00	3,139,939.00	66,011,831.00	2,761,192.00	1,827,208.00	4,588,400.00	70,600,231.00
		MOJANG BARU	5,635,055.00	3,070,000.00	42,017,974.00	2,944,937.00	3,139,939.00	48,102,850.00	2,761,192.00	258,033.00	3,019,225.00	51,122,075.00
		BANTAU PANJANG	4,203,571.00	3,070,000.00	42,017,974.00	2,196,829.00	3,139,939.00	47,254,742.00	2,761,192.00	192,484.00	2,953,676.00	50,308,418.00
		MONGAH JUAI	1,785,000.00	3,070,000.00	42,017,974.00	932,859.00	3,139,939.00	46,090,772.00	2,761,192.00	81,736.00	2,842,928.00	48,933,700.00
		TUSUK BELAWAN	372,000.00	3,070,000.00	42,017,974.00	194,411.00	3,139,939.00	45,352,324.00	2,761,192.00	17,034.00	2,778,226.00	48,130,550.00
		TUMBANG KALAM	1,703,850.00	3,070,000.00	42,017,974.00	890,449.00	3,139,939.00	46,048,362.00	2,761,192.00	78,020.00	2,839,212.00	48,887,574.00
		TUMBANG BAHAN	2,369,793.00	3,070,000.00	42,017,974.00	1,238,478.00	3,139,939.00	46,396,391.00	2,761,192.00	108,514.00	2,869,706.00	49,266,097.00
		TUMBANG KUBANG	2,261,122.00	3,070,000.00	42,017,974.00	1,181,685.00	3,139,939.00	46,339,598.00	2,761,192.00	103,538.00	2,864,730.00	49,204,328.00
		SEPUNDU HANTU	3,299,565.00	3,070,000.00	42,017,974.00	1,724,386.00	3,139,939.00	46,882,299.00	2,761,192.00	151,089.00	2,912,281.00	49,794,580.00
		TUMBANG LAKU	4,976,761.00	3,070,000.00	42,017,974.00	2,500,906.00	3,139,939.00	47,758,819.00	2,761,192.00	227,889.00	2,989,081.00	50,747,900.00
		BURTUT SAPAU	3,874,043.00	3,070,000.00	42,017,974.00	2,024,514.00	3,139,939.00	47,182,527.00	2,761,192.00	177,395.00	2,938,587.00	50,121,114.00
		TUMBANG DARAP	9,844,569.00	3,070,000.00	42,017,974.00	5,144,872.00	3,139,939.00	50,302,785.00	2,761,192.00	450,790.00	3,211,982.00	53,514,767.00
		TUMBANG KASAI	2,789,378.00	3,070,000.00	42,017,974.00	1,457,757.00	3,139,939.00	46,615,670.00	2,761,192.00	127,727.00	2,888,919.00	49,504,589.00
		TUMBANG SETAWAI	1,726,473.00	3,070,000.00	42,017,974.00	902,272.00	3,139,939.00	46,060,185.00	2,761,192.00	79,056.00	2,840,248.00	48,900,433.00
		TUMBANG SEPAN	1,220,194.00	3,070,000.00	42,017,974.00	637,685.00	3,139,939.00	45,795,598.00	2,761,192.00	55,873.00	2,817,065.00	48,612,663.00
		RSAM BATANG	1,275,345.00	3,070,000.00	42,017,974.00	666,508.00	3,139,939.00	45,824,421.00	2,761,192.00	58,399.00	2,819,591.00	48,644,012.00
		TUMBANG TABERAU	617,430.00	3,070,000.00	42,017,974.00	322,836.00	3,139,939.00	45,480,749.00	2,761,192.00	28,382.00	2,789,574.00	48,270,323.00
TANJUNG PAKU	1,864,522.00	3,070,000.00	42,017,974.00	974,418.00	3,139,939.00	46,132,331.00	2,761,192.00	85,377.00	2,846,569.00	48,978,900.00		
		SUBTOTAL	94,184,708.00	61,400,000.00	840,369,480.00	49,222,046.00	62,798,780.00	952,380,306.00	55,223,840.00	4,312,891.00	59,536,721.00	1,011,917,037.00
TOTAL			3,899,410,186.00	664,160,000.00	4,075,743,478.00	2,037,871,881.00	679,290,533.00	6,792,905,892.00	367,835,624.00	178,557,182.00	446,392,806.00	7,339,298,698.00

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/KASUBEN	
KONSEPTOR	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	HUKUM